

Nomor : B/ 1135 /AA.05/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

di

Sanggau

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sanggau. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah berupaya untuk melakukan perbaikan perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah dan PD untuk lebih berorientasi hasil dan berdampak langsung ke masyarakat;
- b. Telah menyusun pohon kinerja yang menjabarkan kinerja mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai ke level kinerja operasional;
- c. Telah dilakukan reviu dan identifikasi terhadap program dan kegiatan melalui metode *desk* antara Bappeda bersama PD sesuai rumpun urusan, dalam rangka efektifitas pencapaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran;
- d. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal terhadap seluruh PD.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau menunjukkan nilai sebesar **60,88** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,08
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,46
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,84
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,88
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level PD.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2022 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melakukan perbaikan pada penetapan kinerja sehingga lebih berorientasi hasil (*outcome*) dan menjawab isu strategis daerah, namun perubahan yang dilakukan baru di dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak dituangkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengingat telah memasuki masa akhir periode dan menyusun pohon kinerja yang menggambarkan penjabaran kinerja mulai dari level pemerintah daerah sampai ke level kinerja operasional.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Meskipun perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah telah berorientasi *outcome*, namun masih ditemukan penetapan target kinerja yang tidak realistis dan tidak mendukung pencapaian kinerja. Target yang seharusnya turun/berkurang justru ditargetkan meningkat setiap tahunnya, sebagai contoh pada indikator kinerja “persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”;
- Masih terdapat rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi *outcome* serta indikator kinerja yang tidak relevan dan cukup pada sebagian PD. Salah satu contohnya pada Dinas Perhubungan dengan sasaran strategis “meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan” belum berorientasi hasil apabila dikawal oleh kepala dinas. Contoh indikator kinerja yang tidak SMART yaitu “jumlah uji KIR angkutan umum”;
- Pohon kinerja yang dimiliki pada level pemerintah daerah dan PD belum sepenuhnya disusun berdasarkan kerangka berpikir logis/*logical framework* dan juga belum mengutamakan *Critical Success Factor (CSF)* sehingga pencapaian kinerja level strategis/*ultimate* tidak sepenuhnya dipengaruhi pencapaian kinerja level taktikal/*intermediate*. Sebagai

contoh pohon kinerja di tingkat pemerintah daerah, kinerja level strategis/*ultimate* “meningkatnya kualitas kesehatan” dipengaruhi kinerja level taktikal/*intermediate* “meningkatnya prestasi pemuda dan keolahragaan” yang dinilai tidak dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian kinerja level strategis/*ultimate*;

- Penetapan program dan kegiatan yang telah disusun oleh PD bersama Bappeda belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, karena masih ditemukan target kinerja yang tidak tercapai, namun disisi lain realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tercapai sesuai target. Sebagai contoh pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan kinerja “produksi sektor pertanian tanaman pangan” tidak tercapai targetnya, namun kinerja program dan kegiatan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyusun definisi operasional terkait cara mengukur indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen IKU. Selain itu, telah disusun rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja, karena terdapat target yang dijabarkan secara berkala.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Data kinerja yang menunjang pengukuran kinerja belum sepenuhnya relevan dengan formulasi perhitungannya, sebagai contoh Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”, namun formulasi perhitungannya “jumlah responden yang puas dibagi jumlah responden dikali 100%” sehingga kurang relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- Pemerintah Kabupaten Sanggau belum memiliki aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan kinerja sehingga pemantauan kinerja pemerintah daerah dan PD masih dilakukan secara manual;
- Pemantauan yang dilakukan masih berfokus pada penyerapan anggaran belum mengarah ke pencapaian kinerja. Selain itu, pemantauan belum dilakukan secara berjenjang sehingga realisasi pencapaian kinerja mulai dari level PD sampai ke level individu pegawai belum terkendali dengan baik;

- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk dijadikan landasan melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan juga dimanfaatkan juga sebagai dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada tingkat pemerintah daerah, serta telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat PD. Laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu kepada Kementerian PANRB.

Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- LPPD Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah memberikan informasi mengenai perbandingan capaian realisasi kinerja pada target tahunan, dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, namun informasi detail terkait dengan keberhasilan/kegagalan dari pencapaian indikator kinerja belum terinformasi dengan baik. Karena lebih menyimpulkan pencapaian sasaran strategis bukan detail per masing-masing capaian indikator kinerja;
- Laporan kinerja pada level PD belum memberikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, contohnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun berikutnya lebih rendah daripada realisasi target kinerja tahun lalu. Sebagai contoh indikator kinerja "rata-rata lama sekolah" yang realisasi kinerja tahun 2021 "7,39" lebih besar dari pada target kinerja tahun 2022 "7,21"

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah menggunakan pedoman evaluasi yang dimiliki, namun pedoman yang digunakan belum mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi AKIP pada setiap PD, hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara hasil rekomendasi evaluasi dengan catatan penilaian hasil evaluasi;
- Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal yang disampaikan belum dilakukan secara berkala, sehingga belum terjadi perbaikan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan kembali penetapan target kinerja pada indikator kinerja baik di tingkat pemerintah daerah dan di tingkat PD untuk lebih realistis dan mendukung pencapaian kinerja dengan cara melihat kembali definisi operasional dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan;
- 2) Memastikan rumusan sasaran strategis agar lebih berorientasi *outcome* dan indikator kinerja yang SMART, khususnya relevan dan cukup pada perencanaan kinerja seluruh PD sehingga dampak kinerja dari seluruh PD menunjang kinerja pemerintah daerah;
- 3) Mereviu kembali pohon kinerja yang dimiliki baik di tingkat pemerintah daerah dan PD agar dapat menggambarkan kerangka berpikir logis/*logical framework*, dan memastikan penjabaran antar level kinerja memiliki hubungan keterkaitan/CSF sehingga membentuk pohon kinerja yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Mendorong Bappeda untuk melakukan reviu pada penetapan program dan kegiatan yang telah disusun oleh PD agar berfokus pada pencapaian sasaran strategis dan juga mendorong adanya pembaharuan gambaran kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih menunjang pencapaian sasaran strategis PD;
- 5) Memastikan kembali pengukuran kinerja sudah ditunjang dengan data kinerja yang relevan dan mendukung pencapaian realisasi kinerja dengan cara memastikan rumusan definisi operasional sudah menggambarkan formulasi perhitungan indikator kinerja yang relevan;
- 6) Membangun aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan kinerja sehingga pemantauan kinerja pemerintah daerah dan PD dapat dilakukan dengan mudah dan cepat;

- 7) Mendorong pemantauan yang dilakukan agar lebih berfokus pada realisasi pencapaian kinerja dan juga mendorong pemantauan kinerja secara berjenjang mulai dari level PD sampai ke level individu pegawai sehingga realisasi pencapaian kinerja dapat dikendalikan dengan baik;
- 8) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk dijadikan landasan melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan juga dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai;
- 9) Mendorong peningkatan kualitas LPPD Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan menginformasikan secara lebih detil terkait dengan keberhasilan/kegagalan dari pencapaian masing-masing indikator kinerja;
- 10) Memastikan penyusunan laporan kinerja di tingkat PD memberikan informasi terkait dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya;
- 11) Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya terkait dengan memastikan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja kedepan lebih baik dari realisasi kinerja pada tahun sebelumnya di laporan kinerja;
- 12) Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dengan mereviu kembali pedoman evaluasi yang dimiliki untuk mengacu pedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- 13) Memastikan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD berisi rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang lebih spesifik yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi PD sehingga kedepannya terjadi perbaikan akuntabilitas kinerja yang signifikan di tingkat PD;
- 14) Mendorong Inspektorat Kabupaten Sanggau untuk melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD secara berkala;

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Barat;
4. Bupati Sanggau.